

Evaluasi Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pada SKPD Dinas

Penerangan Jalan, Pertamanan, dan Pemakaman

Kota Palembang



Skripsi Oleh:

MARIAWATI SIRINGORINGO

NIM. 01061003077

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi**

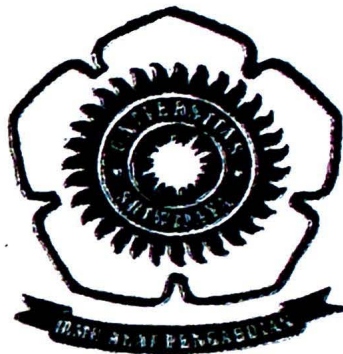
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA
Tahun 2011**

4
352-407
Mar
e
2011
Evaluasi Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pada SKPD Dinas

Penerangan Jalan, Pertamanan, dan Pemakaman

Kota Palembang



Skripsi Oleh:

MARIAWATI SIRINGORINGO

NIM. 01061003077

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA
Tahun 2011

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


**NAMA : MARIAWATI SIRINGORINGO
NIM : 01061003077
JURUSAN : AKUNTANSI
MATA KULIAH : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
JUDUL SKRIPSI : EVALUASI ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN
2006 PADA SKPD DINAS PENERANGAN JALAN,
PERTAMANAN, DAN PEMAKAMAN KOTA PALEMBANG**

PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI :


TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal 16/03/2011 Ketua :


H. Rochmawati Daud, SE, M.Si, Ak
NIP.196409031994032001

Tanggal 16/03/ 2011 Anggota:


H. Aspahani, SE., MM, Ak
NIP.196607041992031004

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

TANDA PERSETUJUAN PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF

NAMA : MARIA WATI SIRINGORINGO
NIM : 01061003077
JURUSAN : AKUNTANSI
MATA KULIAH : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
**JUDUL SKRIPSI : EVALUASI ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR
13 TAHUN 2006 PADA SKPD DINAS PENERANGAN
JALAN, PERTAMANAN, DAN PEMAKAMAN KOTA
PALEMBANG**

Telah diuji di depan panitia ujian komprehensif pada tanggal 28 Februari 2011 dan telah memenuhi syarat untuk diterima

**Panitia ujian Komprehensif
Inderalaya, 28 Februari 2011**

Ketua



Hi. Rochmawati Daud, SE, M.Si, Ak
NIP.196409031994032001

Anggota



Hi. Rina Tisnandharana, SE, MM, Ak
NIP.19650311992032002

Anggota



Sulairaz S. Manggis, SE, MBA, Ak
NIP.196301201992031002

**Mengetahui
Ketua Jurusan Akuntansi**



Drs. Burhanuddin, M.Acc, Ak
NIP 195808281988101001

MOTTO :

- *"Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa!" (Roma 12:12).*

(Penulis)

Kupersembahkan kepada :

- *Jesus Christ My Lord*
- *Kedua Orangtuaku tercinta*
- *Saudara-saudaraku dan seluruh keluargaku tersayang*
- *Para pendidiknya yang terhormat*
- *Agustina Nertea Tobing suamiku dan anakku Keyza Tabita Tobing tercinta*
- *Sahabat dan teman-temanku*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **Evaluasi Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pada SKPD Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan, dan Pemakaman Kota Palembang.**

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yang terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Landasan Teori, Bab III Gambaran Umum SKPD, Bab IV Pembahasan, dan Bab V Kesimpulan dan Saran.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengevaluasi atas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan, dan Pemakaman Kota Palembang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemisahan fungsi yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan. Evaluasi terhadap fungsi pencatatan akuntansi telah sesuai dengan PSAP Nomor 02 paragraph 22 dan paragraph 32, dan untuk pembuatan laporan keuangan dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak terdapat kekurangan yang masih harus diperbaiki. Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat memberikan masukan bagi Universitas Sriwijaya, juga dapat menjadi bahan masukkan akademisi bagi peneliti selanjutnya.

Penulis

Mariawati Siringoringo

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **Evaluasi Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pada SKPD Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan, dan Pemakaman Kota Palembang.**

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapat banyak bimbingan, dukungan, dan arahan dari banyak pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat penulis mengucapkan terimakasih yang setulus tulusnya kepada :

1. **Prof. Dr. Badia Perizade, M.B.A.**, selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. **Prof. Dr. H. Syamsurizal AK**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. **Drs. Burhanuddin, M.Acc, Ak.** selaku Ketua Jurusan Akuntansi
4. **Ibu Yulia Saftiana, SE, M.Si, Ak.** selaku Pembimbing Akademik.
5. **Ibu Rochmawati Daud, SE, M.Si, Ak** selaku Ketua Pembimbing Skripsi dan **Bapak H. Aspahani, SE., MM, Ak** selaku Anggota pembimbing Skripsi, atas kesabaran, waktu, tenaga, pikiran serta sumbangsih dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. **Bapak Sulaiman S. Manggala, SE., MBA, Ak** dan **Ibu Rina Tjandrakirana, SE., M.M, Ak** selaku Dosen Pembahas yang banyak memberikan saran dan kritik yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
7. **Ibu Novi, SP** selaku Kepala Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD Dinas PJPP, beserta staff yang telah memberikan bantuan data.

8. Bapak Edwin Tirta, SE., selaku staff akuntansi yang memberikan informasi dan pengetahuan yang baru tentang akuntansi SKPD khususnya SKPD Dinas PJPP Kota Palembang.
9. Ayah dan Ibu tercinta, Terima Kasih untuk semua doa dan dorongan, serta kepercayaan juga motivasi sampai saat ini.
10. Abang dan adikku tersayang, (Leo dan Tika) atas waktu dan tenaga yang diberikan.
11. Kakak Lona, atas segala bantuan baik fisik dan moral serta penghubung antara penulis dengan objek penelitian. Terima kasih banyak kak,
12. Teman-temanku: (Tia-T.Sipil`06, Atit-Sospol `06, Tini-Tekim`06, Mega Karina P-Fisika`06, Rika-Arsitektur`06). Terima kasih atas semangat kalian yang tak henti-hentinya, Tuhan Memberkati.
13. Rekan-rekan seperjuangan dari SMA hingga kuliah (Ferlly, Astrina, Tiurma) dan teman lainnya (Lia-Mgt`06, Katrine-Mgt`06, Stephanie-Ak`06,dan lain-lain). Terima kasih atas kebersamaan selama ini. Sukses untuk kita semua.
14. Teman-teman seperjuangan dalam penulisan skripsi (Irene, Dian, Rajiba, Onik, Gani, Redho, Pipsy, Bintang dan lain-lain) terima kasih atas *sharing*, semangat satu demi yang lain. Akhirnya penantian kita berujung indah .Tuhan memberkati
15. Dan semua pihak yang tidak dapat, penulis sebutkan satu persatu. Atas bantuannya, terima kasih. *And God Bless Everyone.*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
ABSTRAKSI	x
ABSTRACT	xi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Metodologi Penelitian	5
1.5.1. Rancangan Penelitian	5
1.5.2. Jenis Data	6
1.5.3. Metode Pengumpulan Data	6
1.5.4. Instrumen Penelitian	7
1.5.5. Metode Analisa Data	7
1.6. Sistematika Penulisan Skripsi	7

BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1. Otonomi daerah dan Manajemen Keuangan Daerah	9
2.1.1. Otonomi Daerah	9
2.1.2. Manajemen Keuangan Daerah	10
2.1.3. Perkembangan Peraturan di Sektor Publik.....	12
2.1.4. Manajemen Keuangan Daerah di era pra reformasi.....	15
2.1.5. Manajemen Keuangan Daerah di Era Pasca Reformasi	17
2.2. Pengelolaan Keuangan Daerah	19
2.2.1. Definisi Pengelolaan Keuangan Daerah	19
2.2.2. Pengertian Keuangan Daerah.....	21
2.2.3. Ruang Lingkup Keuangan Daerah.....	21
2.2.4. Asas-Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah	22
2.2.5. Tugas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	24
2.2.6. Hubungan Keuangan Negara dengan Keuangan Daerah.....	24
2.2.7. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah.....	25
2.3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Berjalan.....	28
2.3.1. Pendapatan Daerah.....	29
2.3.2. Belanja Daerah	31
2.3.3. Pembiayaan Daerah.....	34
2.4. Akuntansi Keuangan Daerah.....	34
2.5. Laporan Keuangan SKPD	36
2.5.1. Laporan Realisasi Anggaran	39
2.5.2. Neraca	41
2.5.3. Catatan Atas Laporan Keuangan.....	42

BAB III GAMBARAN UMUM SKPD	43
3.1. Sejarah SKPD.....	43
3.2. Tugas Pokok dan Fungsi	44
3.2.1 Bidang Penerangan Jalan dan Sarana Umum.....	44
3.2.2 Bidang Pertamanan	48
3.2.3 Bidang Pemakaman.....	50
3.2.4 Bidang Kesekretariat.....	51
3.3 Visi dan Misi	52
3.3.1 Struktur Organisasi.....	53
3.3.2 Program Strategis	67
3.3.3 Sasara dan Program.....	68
3.4 Rekap Hasil Pembangunan smpai dengan Tahun 2008	69
3.5 Sumber Daya.....	69
3.5.1 Sumber Daya Peralatan	69
3.5.2 Sumber Daya Manusia	70
3.6 Data Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2009.....	70
3.7 Penatausahaan Keuangan Daerah	70
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	74
4.1. Analisis Terkait pembagian fungsi pengelolaan keuangan daerah	74
4.2. Analisa terhadap Fungsi Pencatatan Akuntansi	76
4.2.1 Analisis Penatausahaan Pendapatan dan akuntansi realisasi pendapatan	77
4.2.2 Analisis Penatausahaan Belanja dan akuntansi realisasi belanja	79
4.3. Evaluasi Laporan Keuangan	81
4.3.1 Laporan Keuangan Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005	82
4.3.2 Konversi ke Permendagri Nomor 13/2006	84
4.3.3 Hasil Analisis	85

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	88
5.1. Kesimpulan	88
5.2. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Evaluasi Atas Pengelolaan Keuangann Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor
13 Tahun 2006 Pada SKPD Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan, dan
Pemakaman Kota Palembang

ABSTRAK

Pembaruan tentang pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dengan disahkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Permendagri No.13/2006 menuntut peranan yang lebih besar dari unsur keuangan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti pelaporan keuangan yang dihasilkan di masing-masing SKPD, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) yang ada di SKPD mengurus semua proses pertanggungjawaban keuangan unit kerja, dan masing-masing kepala SKPD bertanggungjawab atas laporan keuangan SKPD terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi atas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan, dan Pemakaman (PJPP) Kota Palembang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SKPD Dinas PJPP telah melakukan pemisahan fungsi yang benar sesuai dengan Pasal 5 terlihat dari adanya pemisahan fungsi yang jelas antara fungsi perbendaharaan, penatausahaan keuangan, fungsi akuntansi dan pelaksana teknis kegiatan. Evaluasi terhadap fungsi pencatatan akuntansi terlihat dari penatausahaan akuntansi pendapatan dan belanja dimana prosedur dan pencatatan telah sesuai dengan PSAP Nomor 02 paragraf 22 dan paragraph 32. Sedangkan pembuatan laporan keuangan dilakukan dua kali dalam satu tahun pada periode semester (Januari-Juni) dan periode tahunan (Januari-Desember) dimana telah dilakukan konversi laporan keuangan dari PP No.24 Tahun 2005 ke Permendagri No.13 Tahun 2006 .

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Penatausahaan Akuntansi, Permendagri No.13/2006, PP No.24 Tahun 2005.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Perkembangan Undang-Undang Otonomi Daerah.....	15
Gambar 2.2	Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah.....	20
Gambar 3.1	Struktur Organisasi Dinas PJPP Kota Palembang.....	53
Gambar 3.2	Organisasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas PJPP...	67
Gambar 3.3	Bagan Alir Pendapatan Daerah-Bendahara Penerimaan.....	73
Gambar 4.1	Konversi Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.....	85

*Evaluation Based on Local Keuangann Management Permendagri Number 13
Year 2006 On SKPD Street Lighting Service, Gardening, dan Funeral
Palembang City*

ABSTRACT

Update on financial management is characterized by the issuance of Government Regulation No. 58 of 2005 with the adoption of the Minister of Home Affairs Regulation No. 13 of 2006. No.13/2006 Permendagri demanding a greater role than financial element in each of the regional work units (SKPD) such as financial reporting resulting in each SKPD, Finance Administration Officer (PPK) and the Technical Executive Officer (PPTK) which SKPD care of all there is in the process of financial accountability unit, and each head SKPD responsible for financial statements related SKPD. This study aims to evaluate the management of local finance in the Office of Information SKPD Road, Gardening, and a Funeral (PJPP) Palembang.

The results showed that SKPD PJPP Department has conducted a true separation of functions in accordance with Article 5 seen from the existence of a clear separation of functions between treasury functions, financial administration, accounting and technical implementation activities. The evaluation of the accounting function visible from the administration of accounting whereby revenues and expenditures and recording procedures are in accordance with the PSAP No. 02 paragraph 22 and paragraph 32. While making financial reports are made twice in one year in the period of the semester (January-June) and annual period (January-December) which has done the conversion of financial statements of the PP No.24 of 2005 to Permendagri No. 13 of 2006.

Keywords: Fiscal Management, regional work units, Administration, Accounting, Permendagri No.13/2006, PP No. 24 of 2005.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI/ TIDAK PLAGIAT

Yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : MARIAWATI SIRINGORINGO

NIM : 01061003077

JURUSAN : AKUNTANSI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul :

Evaluasi Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pada SKPD Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan, dan Pemakaman Kota Palembang

Pembimbing :

Ketua : Hj. Rochmawati Daud, SE, M.Si, Ak

Anggota : H. Aspahani, SE., MM, Ak

Tanggal diuji : 28 Februari 2011

Isi skripsi ini tidak ada hasil karya orang lain yang saya salin keseluruhan atau sebagian tanpa menyebutkan sumber aslinya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini saya buat dengan tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi dengan peraturan termasuk pembatalan gelar keserjanaan saya.

Inderalaya, Maret 2011

Yang Memberi Pernyataan



Mariawati Siringoringo

NIM.01061003077

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN BAB I


NAMA : MARIA WATI SIRINGORINGO
NIM : 01061003077
JURUSAN : AKUNTANSI
MATA KULIAH : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
JUDUL SKRIPSI : EVALUASI ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN
2006 PADA SKPD DINAS PENERANGAN JALAN,
PERTAMANAN, DAN PEMAKAMAN KOTA PALEMBANG

PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI :


TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal 02/09/2010 Ketua :


Hj. Rochmawati Daud, SE, M.Si, Ak
NIP.196409031994032001

Tanggal 13/10/2010 Anggota:


H. Aspahani, SE., MM, Ak
NIP.196607041992031004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

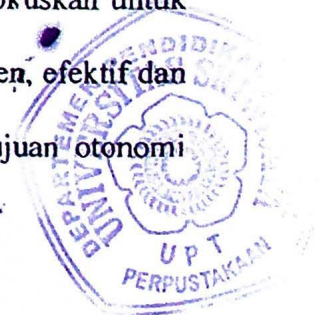
Reformasi desentralisasi di Indonesia yang dimulai tahun 2000 merupakan perwujudan dari komitmen Indonesia menuju pemerintahan daerah yang demokratis dan pembangunan yang berkelanjutan. Dikeluarkannya Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah menjadi penanda terbukanya kesempatan luas bagi usaha pembangunan daerah dan bagi partisipasi warga yang lebih besar dalam pemerintahan. Sejak awal penerapan kebijakan tersebut masyarakat dan pemerintahan daerah telah menjawab kesempatan tersebut dengan antusias dan kreativitas yang luar biasa hingga menghasilkan capaian inovasi yang luar biasa pula.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa reformasi akuntansi di pemerintahan dimulai dengan terbitnya Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah. Sejak munculnya Kepmendagri 29 Tahun 2002 tersebut, pemerintah daerah mulai disibukkan dengan upaya untuk menerapkan akuntansi sebagaimana yang diarahkan dalam Kepmendagri tersebut. Pada waktu itu Indonesia belum memiliki standar akuntansi pemerintahan yang bisa digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan sistem akuntansi. Sehingga pemerintah daerah mengalami stagnasi dalam mengimplementasikan sistem akuntansi keuangan daerah. Kondisi ini

dipersulit dengan lemahnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Sangat sedikit sekali pemerintah daerah yang memiliki tenaga dengan latar belakang pendidikan akuntansi.

Kedua hal tersebut menyebabkan proses pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan menjadi terhambat. Perubahan mulai terjadi lagi sejak diterbitkannya PP 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sampai saat ini kita masih mengacu pada peraturan-peraturan tersebut dalam mengimplementasikan sistem akuntansi di pemerintahan daerah.

Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan dan pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut. Dengan pemberian otonomi daerah kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan untuk mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabel. Beberapa prioritas perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah penting dilakukan, terutama dalam aspek anggaran, akuntansi dan pemeriksaan. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik difokuskan untuk mengelola sistem dana desentralisasi dengan transparan, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Tujuan otonomi



daerah itu sendiri adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah maka pemerintah daerah harus mengikuti aturan yang telah dibuat agar tercipta pemerintahan yang transparan dan mandiri. Salah satu perubahan mendasar dalam manajemen keuangan daerah pasca reformasi keuangan daerah adalah perubahan sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah. Inti dari perubahan tersebut adalah tuntutan dilaksanakannya akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah, baik pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten dan kota, bukan pembukuan seperti yang dilaksanakan selama ini (Halim, 2002: 5).

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah perlu didukung oleh sistem pengelolaan keuangan yang cepat, tepat dan akurat. Pembaruan tentang pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dengan disahkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Implementasi Permendagri Nomor 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah harus diiringi dengan penataan kelembagaan unit kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia keuangan. Hal ini mengingat bahwa pengelolaan keuangan selama ini hanya dilakukan di biro/bagian keuangan pemda, sementara Permendagri No.13/2006 menuntut peranan yang lebih besar dari unsur keuangan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), seperti (1) pelaporan keuangan dihasilkan di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD), (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan

Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) yang ada di SKPD mengurus semua proses pertanggungjawaban keuangan unit kerja, dan (3) masing-masing Kepala SKPD bertanggung jawab atas Laporan Keuangan SKPD terkait. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah diterapkan dengan peraturan kepala daerah dan mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah meliputi serangkaian prosedur yang dimulai dari prosedur pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, baik secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer. Proses tersebut diimplementasikan dalam bentuk jurnal dan buku besar, bila perlu ditambah dengan buku besar pembantu. Terkait hal tersebut setiap SKPD wajib menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah, tak terkecuali Dinas Penerangan Jalan, Pemakaman dan Pertamanan Kota Palembang. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul *Evaluasi atas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penerangan Jalan, Pemakaman dan Pertamanan Kota Palembang*.

1.2 Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pembagian fungsi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman (PJPP)?
- b. Apakah fungsi pencatatan akuntansi yang telah dilaksanakan selama ini telah sesuai dengan peraturan terkait?
- c. Apakah laporan keuangan yang telah dibuat telah sesuai/relevan dengan peraturan terkait?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi atas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan, dan Pemakaman Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Palembang dapat dijadikan sebagai acuan implementasi pemahaman Akuntansi Keuangan Daerah. Sedangkan bagi penulis, penelitian ini diharapkan mampu menjawab rasa keingintahuan terhadap persoalan yang terjadi terhadap dinas terkait. Dan terakhir bagi akademisi, semoga penelitian ini dapat memperkaya kepustakaan terutama dibidang Akuntansi Sektor Publik.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Rancangan penelitian

Penelitian ini dirancang untuk menjelaskan evaluasi atas pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

1.5.2 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau dicatat oleh pihak lain, umumnya berupa bukti, catatan, laporan historis yang telah disusun dalam arsip dipublikasikan ataupun tidak (Indriantoro dan Supomo, 2002 :147).

Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah :

- Sejarah singkat SKPD Dinas PJPP
- Gambaran Umum Dinas PJPP
- Struktur organisasi Dinas PJPP
- Laporan Keuangan Dinas PJPP Tahun Anggaran 2009

Data yang digunakan diperoleh dari bagian keuangan dinas PJPP dan situs Dinas PJPP.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- Metode wawancara, dengan metode ini penulis dapat menerangkan secara detail pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.
- Metode angket terbuka, pengumpulan data dilakukan dengan membuat beberapa daftar pertanyaan yang diisi oleh pihak terkait dalam hal ini adalah staf akuntansi Dinas PJPP

1.5.4 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu pada waktu mahasiswa menggunakan suatu metode pengumpulan data (Arikunto,1991). Pada penelitian ini instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang berisi butir-butir pertanyaan untuk diberikan tanggapan oleh para responden.

1.5.5 Metode Analisis Data

Dalam metode analisa data pada penelitian ini penulis akan menguraikan :

- a. Pembagian fungsi terkait pengelolaan keuangan daerah pada Dinas PJPP.
- b. Pencatatan akuntansi yang telah dilaksanakan oleh Dinas PJPP selama ini khususnya pada Tahun Anggaran 2009.
- c. Pelaporan dan pengungkapan transaksi keuangan.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori yang akan dipergunakan sebagai dasar untuk membahas permasalahan, berisikan pengertian dan konsep tentang Akuntansi Keuangan Daerah untuk SKPD serta Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB III DATA DAN HASIL PENELITIAN

Berisi gambaran umum objek yang diteliti dalam hal ini adalah SKPD Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman (PJPP) Kota Palembang serta beberapa hasil penelitian terhadap objek tersebut.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berisikan uraian tentang analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Bagian penutup berupa kesimpulan atas hasil analisis serta saran bagi objek yang diteliti.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

TANDA PERSETUJUAN BAB II

NAMA : MARIA WATI SIRINGORINGO
NIM : 01061003077
JURUSAN : AKUNTANSI
MATA KULIAH : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
JUDUL SKRIPSI : EVALUASI ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN
2006 PADA SKPD DINAS PENERANGAN JALAN,
PERTAMANAN, DAN PEMAKAMAN KOTA PALEMBANG

PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI :

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal 4/10/2010 Ketua :



Hj. Rochmawati Daud, SE, M.Si, Ak
NIP.196409031994032001

Tanggal 2/11/2010 Anggota:



H. Aspahani, SE, MM, Ak
NIP.196607041992031004

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi II, Jakarta: Salemba Empat.
- Hafis Tanjung, Abdul. 2009. *Pentausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah untuk SKPD*, Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul (editor), *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hariwijaya, M dan Djaelani, Bisri M. 2004. *Tehnik Menulis Skripsi dan Tesis*, cet I, Yogyakarta: Hanggar Kreator.
- Indrianto, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*, Edisi Pertama cet II, Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Mulyana, Budi. 2009. *Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, Vol. 2 No.1 (Mei 2006).
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Tualsikal, Askam. 2008. *Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan, dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi pada Provinsi dan Kabupaten Kota di Maluku)*. Diambil dari <http://www.slideshare.net/Askam/pengawasan-keuangan>.
- Ulum, Ihyaul. 2009. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- <http://dpjpp.palembang.go.id/>
- www.depdagri.go.id/media/.../i/bisnis_proses_permen_13-2006_edit.pdf